



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
MENGENAI PELAKSANAAN PROGRAM KEAGAMAAN, SOSIAL,
BENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2021–2022
TANGGAL, 15-19 April 2022



Sekretariat Komisi VIII DPR RI

Set_komisi8@dpr.go.id

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	DASAR HUKUM	6
BAB III	PELAKSANAAN DAN TEMUAN LAPANGAN	7
A	Pelayanan keagamaan Kakanwil Kemenag Kepulauan Riau	7
B	Pelayanan keagamaan Kakanwil Kemenag Kepulauan Riau	8
C	Kesejahteraan Sosial, Pananganan Bencana dan Perlindungan Perempuan-Anak	11
D	Pengawasan Penyaluran BLT Minyak Goreng dan Bantuan Sosial Kota Batam	13
BAB IV	REKOMENDASI	16
BAB V	PUBLIKASI MEDIA CETAK - ELEKTRONIK KEGIATAN KUNKER RESES KOMISI VIII DPR RI	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Kepulauan Riau.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang terkait program dan anggaran APBN dibidang keagamaan, sosial, bencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Menggali dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau terkait masalah agama, sosial, bencana dan perlindungan perempuan dan anak.

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan program agama, sosial, bencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Untuk memperoleh masukan tentang permasalahan, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program agama, sosial, bencana, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kepulauan Riau.

C. Anggota Tim Kunker RESES

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	003	H. MARWAN DASOPANG	Ketua Tim	PKB	SUMUT II
2.	172	SELLY ANDRIANY GANTINA	Anggota	PDIP	JABAR VIII
3.	186	PARYONO, SH, MH	Anggota	PDIP	JATENG IV
4.	236	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	Anggota	PDIP	NTB II
5.	218	INA AMMANIA	Anggota	PDIP	JATIM VII
6.	275	Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.	Anggota	P G	JAMBI
7.	346	IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, MH	Anggota	PG	GORONTALO
8.	351	DRA. DELMERIA	Anggota	NASDEM	SUMUT II
9.	28	MF. NURHUDA Y	Anggota	PKB	JATENG X
10.	529	Dr. H. ACHMAD, M.Si.	Anggota	PD	RIAU I
11.	510	H. MUHAMMAD RIZAL, SH., M.Si	Anggota	PAN	BANTEN III
12.	438	Dr. K.H.SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	Anggota	PKS	JABAR X
13.	-	ACHMAD SOFIAN BAHTIAR, S.Sos	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
14.	-	HERU PRIBADI, S.A.P.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
15.	-	RIZZA BIMA PERMATA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
16.	-	JODY PRATAMA PUTRA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
17.	-	AHMAD ARI MASYHURI, M.Ag	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
18.	-	Dr. AGUS SUSANTO, M.A.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
19.	-	ARIEF RACHMAN	MEDIA CETAK DAN SOSIAL DPR		

BAB II

DASAR HUKUM

D. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib DPR RI:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI Masa Reses.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEMUAN LAPANGAN

A. Sekilas Pandang Kepulauan Riau

Letak Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna dan merupakan propinsi dengan wilayah strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Sumber daya alam daerah ini juga kaya, di antaranya bidang minyak dan gas, serta maritime, tidak heran jika propinsi Kepulauan Riau atau disingkat Kepri menjadi daya magnet investasi dan hadir beragam penduduk dengan latar belakang sosial keagamaan tumbuh subur di daerah pemekaran dari Provinsi Riau tersebut.

Provinsi Kepri ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002. Namun, penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai dua tahun kemudian, tepatnya pada 1 Juli 2004 oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Megawati Soekarnoputri.

Adapun Ibukota Provinsi Kepri adalah Kota Tanjungpinang, dan memiliki 5 kabupaten dan 2 kota. Adapun kabupaten dan kota di Provinsi Kepri adalah Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang, dan secara geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil dengan jumlah penduduk 2,18 juta (susenas 2019).

Daerah dengan moto “Berpancang Amanah, Bersauh Marwah” ini juga dikenal sebagai gerbang pariwisata bahari kedua setelah Bali. Jutaan wisatawan berkunjung setiap tahun ke provinsi kepulauan ini untuk menikmati beragam destinasi wisata baik bahari, sejarah, maupun keindahan alam. Kepri memiliki potensi sumber daya alam mineral, dan energi yang relatif cukup besar, dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi, dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa. Sehingga menjadi penting memastikan kondisi pelayanan keagamaan, perlindungan sosial, penanganan bencana alam dan perlindungan perempuan dan anak di propinsi Kepri

B. Pelayanan keagamaan Kakanwil Kemenag Kepulauan Riau

Pada kesempatan kunjungan kerja reses anggota Komisi VIII DPR RI yang di pimpin oleh Bapak H. Marwan Dasopang, M.Si Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI bersama rombongan tim kunker reses mendengarkan langsung penjelasan dari kepala kanwil kepulauan riau, pada acara tersebut hadir dari kemenag RI direktur pengelolaan dana haji dan sistem siskohat, direktur bimas kristen, direktur bimas budha dan semua kepala kantor kemenag Kabupaten dan kota serta stakeholder terkait pelayanan keagamaan di kepulauan riau, sebagaimana kita ketahui bahwa mayoritas penduduknya propinsi kepulauan riau beragama Islam dengan rincian; Islam 78 % (1.440.860), Kristen 12 % (226.823), Budha 8 % (1440.445), Katholik 0,8 % (45.720), Konghucu 0,17 % (3.237), Hindu dan lainnya 0,12 % (1.200).

Berdasarkan pemaparan kepala kanwil kepulauan riau bapak Dr H. Mahbub D, bahwa mengacu pada tujuh program prioritas kementerian agama pusat, maka kakanwil propinsi riau menyampaikan beberapa kemajuan dan kendala yang dihadapi oleh pegawai kemenag dikarenakan letak geografis kepulauan, sehingga program prioritas revitalisasi KUA sebagai beban kerja yang dilaksanakan tidaklah sama dengan daerah yang berupa daratan, hal ini tentunya menjadi pemikiran bersama, bahwa anggaran operasional kepala KUA yang bertugas didaerah kepulauan harusnya berbeda dengan yang daratan, sebagai contoh menjadi staf kemenag di kota batam atau kota pangkal pinang dan kemudian dinaikkan menjadi kepala KUA didaerah kepulau di kab anambas atau kab natuna, secara jabatan lebih baik tetapi pada faktanya disini lebih memilih menjadi staf ketimbang menjadi kepala KUA yang ditempatkan di kecamatan kepulauan, inilah yang menjadi problem karena anggaran berbasis daerah daratan, bukannya disesuaikan dengan daerah kepulauan, untuk pihak kakanwil meminta kepada Komisi VIII DPR RI agar ikut menyuarakan tentang kebijakan anggran berbasis kepulauan.

Adapun pelaksanaan pada priotitas utama program moderasi beragama dan indeks toleransi beragama, bahwa kepulauan riau alhamdulillah menempati urutan rata-rata teratas indeks toleransi beragama (76,20%) tahun 2021, hal ini berkat kerjasama yang erat dengan semua stakeholder dan forkompinda propinsi kepulaaun riau, saat ini yang perlu terus digencar sosialisasi pendirian tempat ibadah, bahwa kemenag propinsi dan kab/kota masih dianggap sebagai institusi

yang memberikan izin pendirian rumah ibadah, padahal mengacu kepada peraturan presiden tentang pendirian rumah ibadah itu izinya dari pemerintah daerah, posisi kemenag hanya memberikan telaah hasil kajian sebagai pertimbangan, tapi masyarakat beranggapan bahwa ijin pendirian rumah ibadah dari kemenag, ini masih salah kaprah, bahwa iya kemenag yang mengurus pelayanan keagamaan tapi tidak berwenang menerbitkan pendirian rumah ibadah.

Sedangkan dalam pelayanan pendidikan keagamaan di kepulauan riau, bahwa saat ini MAN IC Batam tahun ini akan membuka kelas kurikulum international, dan lulusannya nanti bisa masuk ke perguruan tinggi internasional, kemudian terkait dengan penegerian sekolah MTS dan MA di propinsi riau, ada 3 setingkat MA dan 2 MTs yang saat ini sedang verifikasi penegerian, ini semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas dari sekolah tersebut, sekolah tersebut tersebar di kota batam, kab anambas dan kab lingga. Berkenaan dengan tunjangan guru, pada saat propinsi riau termasuk daerah tertinggal, ada tunjangan khusus untuk guru yang bertugas di daerah terluar kepulauan yang berdekatan dengan negara malaysia, vietnam dan singapura, namun saat ini status daerah tertinggal kepulauan riau sudah di cabut sehingga berdampak terhadap para guru yang bertugas di daerah-daerah kepulauan, biaya transportasi antar pulau tentunya tidak sama dengan transportasi darat, karena itu kakanwil meminta komisi VIII DPR RI ikut serta memperjuangkan aspirasi para guru yang bertugas di kepulauan ini.

Dukungan fasilitas pendidikan dan pelayanan keagamaan dari sumber SBSN sangat bermanfaat bagi pengembangan pelayanan keagamaan di propinsi riau, karena itu kakanwil kemenag kepulauan riau sangat mengapresiasi atas dukungan dari Komisi VIII DPR RI yang telah menyetujui SBSN sebagai salah sumber pendanaan untuk perbaikan kualitas dan pembangunan infrastruktur pelayanan keagamaan khususnya daerah yang berbatasan dengan luar negeri, ini akan menjadi itelase kemenag dengan negara tetangga, bangunan yang berkualitas tentunya akan memberikan efek positif bagi kinerja dan kualitas kerja pelayanan keagamaan, sebagai laporan bahwa tahun ini kepulauan riau memadatkan sumber SBSN sebanyak 3 project pembangunan KUA dan Madrasah karena itu merupakan suatu kehormatan dan apresiasi bagi kakanwil kemenag kepulauan riau.

Kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, prinsipnya sudah siap dengan format standar proses, dan dari pihak kakanwil telah mensosialisasikan kebijakan bahwa tidak ada kenaikan biaya haji sebagaimana telah disepakati oleh komisi VIII DPR RI bersama Kemenag RI, kabar ini merupakan angin segar bagi seluruh jamaah di kepulauan riau yang telah menunggu selama dua tahun, keberhasilan diplomasi dengan kuota yang telah dijanjikan sebanyak 50% dari jumlah kuota seperti biasanya merupakan anugerah, sehingga para jamaah calon haji merasa lega dan tentunya kita akan mempersiapkan secara baik, termasuk alat test PCR yang dimiliki bandara hang nadiem sebelum keberangkatan jamaah haji, test PCR bisa dalam hitungan jam sudah diketahui, dengan alat yang cukup modern dalam test PCR ini.



Penyerahan secara simbolis pembangunan madrasah dan KUA dari sumber dana SBSN oleh wakil ketua komisi VIII DPR RI bersama direktur Kemenag RI kepada Kakanwil Propinsi Kepulauan Riau

C. Kesejahteraan Sosial, Pananganan Bencana dan Perlindungan Perempuan-Anak

Pada kunjungan kerja reses dengan pemerintah propinsi kepulauan riau, tentang masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana dan perlindungan perempuan – anak di kepulauan riau, pada saat itu yang ikut hadir langsung dalam pertama kunjungan reses komisi VIII DPR RI adalah bapak plt sekda propinsi kepulauan riau yang sekaligus sebagai kepala dinas sosial propinsi kepulauan riau, menurut laporan dari bapak sekda bahwa pada September 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 137,75 ribu orang (5,75 persen), berkurang sebanyak 6,71 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 144,46 ribu orang (6,12 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 5,72 persen, turun menjadi 5,37 persen pada September 2021. Selain itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 11,10 persen juga turun menjadi 10,45 persen pada September 2021, untuk itu dari pemerintah propinsi kepulauan riau berharap ada penambahan penanganan untuk kelompok rentan miskin dan masalah sosial lainnya agar kedepan kemiskinan lebih menurun dan tertangani secara berkesinambungan masa akan datang. Saya berharap kunjungan reses anggota komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh bapak H. Marwan Dasopang bersama tim kunker reses, memberikan manfaat dan senantiasa proponsi kepri diperjuangkan dalam bidang penanganan sosial dan bencana.

Seperti kita ketahui bersama kendala dalam penanganan bencana dikarenakan lokasi geografis yg jauh dan terpencar-pencar di kepulauan riau ini, karena itu kami menyampaikan aspirasi kepada Kemsos RI melalui komisi VIII DPR RI untuk menambah buffer Stok di provinsi dan kabupaten / kota wilayah kepri. Kemudian dana dekonsentrasi sosial kementerian sosial ke pemerintah propinsi dalam membantu penanganan masalah di kepri, termasuk juga membantu pengentasan kemiskinan ekstrem di kabupaten lingga dan wilayah lain di provinsi kepri dalam bentuk mekanisme satu pintu dalam penyaluran bantuan sosial

Masalah Perbedaan data penerima BPNT antara pada penyaluran PT. pos dan Bank himbara, ini semua bermuara pada data DTKS yang terjadi mutakhiran tidak berjalan secara baik, karena itu menjadi penting, sehingga prioritas pengentasan kemiskinan dengan sistem pendataan DKTS akan dengan sendiri

terverifikasi dan tervalidasi secara sinergi antara dinas sosial kabupaten dan kota dengan dingsos provinsi secara berjenjang.



Rapat kunker reses komisi VIII DPR RI bersama Pemprov Kepri dan mitra Kemensos RI, KPPPA, dan BNPB bertempat di graha Kepri Batam

Pekerjaan rumah terbesar dalam pengentasan kemiskinan dan masyarakat bangkit dari kemiskinan melalui program kesejahteraan dan perlindungan sosial di kementerian sosial RI sampai tingkat bawah, akan menjadi sia-sia jika data DTKS yang dilakukan tidak dimutakhirkan secara berkala, sehingga tidak heran jika ada orang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan sosial, atau orang yang sudah kaya masih masuk dalam data penerima program BPNT. Karena itu Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja reses ini menekan dua hal, pertama perbaiki data DTKS secara berjenjang dan berkala secara profesional dan transparan, kedua buat agenda membangun kemandirian dari penerima PKH untuk menjadi orang yang bisa berusaha dan keluar dari kemiskinan dengan program dan tahapan-tahapan membangun skill dan ketrampilan sehingga nantinya mereka menjadi pengusaha sukses dan tidak tergantung kepada bantuan sosial ini

Propinsi kepulauan riau yang secara geografis banyaaak pulau tentunya sangar rawan bencana alam seperti angin putting beliung, gelombang pasang, dll sehingga perlu sarana dan prasarana mitigasi bencana gelombang pasang, seperti tadi dilaporkan dari BPBD tentang keterbatasan peralatan penanganan bencana di kabupaten / provinsi, maka langkah program pencegahan bencana berbasis local (desa Tangguh bencana) di wilayah perbatasan dan atau seluruh daerah di provinsi riau menjadi sangat penting, dengan tersebarnya penduduk yang di pulau-pulau

maka tidak mungkin disribusi bantuan bencana seperti di daerah daratan karena itu, perlunya ada early warning sistem dan lumbung sosial yang siap siaga setiap saat jika ada bencana akan segera tertangani dengan cepat.

Kondisi sosial masyarakat propinsi kepulauan riau khusus di kota batam sangat beragam, sebagai propinsi yang memiliki kota otoritas bisnis, maka banyak orang yang berdatangan dari segala lapisan sosial masyarakat mengadu nasib di kepulauan riau khususnya kota batam, sebagai kota metropolitan khusus, yang berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga malaysia, singapura dan vietnam maka sarana dan prasarana cukup bagus dan terkecuali dalam hal perlindungan perempuan dan anak, lalu bagaimana dengan kondisi sosial perlindungan anak dan perempuan, menurut data terakhir, bahwa di kota marak terjadi kekerasan, untuk perlu dilakukan penyediaan sarana dan prasarana penempatan korban tindak kekerasan di wilayah kepri, baik preventif, kuratif, dan rehabilitative. Melalui program yang tepat sasaran dan sistem pelayanan terhadap korban dengan mengandeng semua kemitraan dan stakeholder maka potensi terjadi kekerasan akan segera terdeteksi secara dini.

Semua masukan dan permasalahan kesejahteraan sosial, penanganan bencana dan perlindungan perempuan dan anak di kepulauan riau ini akan menjadi bahan masukan yang sangat berrarti dalam pembahasan-bahasan di rapat komisi VIII DPR RI, banyaknya masalah dan langkah yang telah dilakukan oleh kementerian sosial, BNPB dan KPPPA merupakan jalan yang terus harus di awasi bersama-sama, sehingga kebijakan yang ada dan permasalahan sosial yang ada tertangani secara cepat dan tepat. Aspirasi dari peserta rapat kunker reses ini merupakan masukan yang penting dan berharga untuk perbaikan kedepannya.

D. Pengawasan Penyaluran BLT Minyak Goreng, PBNT dan PKH Kota Batam

Penyaluran BLT minyak goreng dan penyerahan BPNT dan PKH bertempat di Panggung Utama Dataran Engku Puteri, Jalan Engku Puteri, Kota Batam Kepulauan Riau kota Batam. . Dalam sambutannya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di depan walikota Batam dan Kemensos RI serta dinas sosial batam dan juga warga 139.868 KK yang hadir dalam kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI, Bapak Marwan Dasopang menegaskan bahwa sengaja berkunjung ke Kepri, Kota Batam, disamping penyaluran BLT minyak goreng, tim kunker reses juga ingin mendengar aspirasi masyarakat. Sebagai gambaran bahwa sekarang

penerima PKH 10 juta keluarga se indonesia dan jika dikalikan uang yang dikeluarkan se jumlah Rp 43 triliun hanya dihabiskan untuk tak ada manfaatnya. Belum lagi BLT, belum lagi BPNT, untuk itu komisi VIII DPR RI menginginkan kedepannya sesuai perubahan struktur Kementerian Sosial mengangkat warga indonesia termasuk kota batam ini dari garis kemiskinan menjadi sejahtera. Warga keluar dari PKH disambungkan dengan permodalan. Warga didorong untuk membuka usaha sendiri demi membangkitkan perekonomian keluarga. Sehingga berhenti sebagai penerima bantuan pemerintah. Misalnya dibantu modal usaha Rp 10 juta. Dipermudah juga cara pencairannya. Sehingga tidak dipersulit persyaratannya seperti metode di Bank. "Bantuan hari ini amanah untuk masyarakat,

Berdasarkan jumlah penetapan DTKS Kemensos RI sebanyak 362.826 jiwa warga kota batam, sebagaimana laporan dari dinas sosial kota batam bahwa Jumlah penerima BPNT/sembako bulan Mei dan penebalan bantuan program sembako (BLT) minyak goreng 28.972 KPM (Data Kemensos). Jumlah penerima PKH Kota batam tahun 2022 per 3 bulan (4 tahap), Tahap 1 termin 1 sampai dengan 7 sebanyak 21.627 KPM. Tahap 2 Termin 1 sampai 2 sebanyak 18.866 KPM.



Suasana acara penyaluran BLT minyak goreng oleh Komisi VIII DPR RI bersama walikota batam dan kemensos RI

Pada kesempatan sambutan sebelum penyerahan BLT minyak goreng, BPNT dan PKH, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan jumlah kasus Covid-19 di Kota Batam hanya 8 orang. Karena itu di Batam tidak menutup industri selama pandemi Covid-19 sehingga kegiatan ekonomi tidak mati. Langkah ini dilakukan demi kita semua. 4.7 persen pertumbuhan ekonomi kita rasakan hari ini. Tahun depan Walikota Batam menargetkan diangka 6 persen pertumbuhan ekonomi tahun

depan, adapun upaya yang dilakukan ada beberapa pembangunan diantaranya seperti pembangunan Bandara Hang Nadim Batam, Dalam kesempatan ini, Rudi meminta kepada DPR RI agar ketentuan tes PCR untuk Wisman dihapuskan. Ia berharap setelah Lebaran tes PCR untuk Wisman ini dihapuskan. Dan walikota batam berkomitmen untuk mnegurangi angka kemiskinan di kota batam sehingga penerima BPNT dan PKH menurun secara drastis seiring pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Komitmen ini perlu dibuktikan dengan bentuk menurunkan angka kemiskinan dan tingkat penerimaan dana manfaat dan bantuan sosial dan bantuan lainnya, sehingga masyarakat mandiri dan sejahtera.

Program BLT minyak goreng merupakan program pengaman sosial dilarenakan lonjakan harga minyak goreng dan kebanyakan masyarakat miskin indonesia tidak terjangkau harganya tapi merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu program BLT minyak goreng ini terbatas dan insidental guna kepentingan sosial masyarakat agar bisa membantu beban ekonom masyarakat yang terdampak covid-19 dan mulai bangkit, sehingga denga BLT minyak goreng bagi masyarakat yang telah data kemiskinan tercantum di DTKS maka diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam menekan ketimpangan sosial dan mendorong kesejahteraan sosial serta kemandirian ekonomi.

.

BAB IV.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di provinsi kepulauan riau disampaikan beberapa rekomendasi, antara lain

- 1) Kementerian Agama RI untuk segera melakukan revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana asrama haji kota batam propinsi kepulauan riau
- 2) Kementerian Agama RI agar secepatnya koordinasi dengan otorita batam dan walikota batam untuk memastikan hibah tanah untuk pembangunan asrama haji
- 3) Kementerian Agama RI agar memberikan deadline revitalisasi pembangunan asrama haji kepada kakanwil kepulauan kepri berkenaan dengan kepastian hibah tanah dari otorita dan walikota batam dengan membuka opsi memindahkan pembangunan asrama haji ke propinsi riau
- 4) Kementerian Agama RI untuk memperhatikan tunjangan khusus dan kesejahteraan KUA dan Guru yang ditempatkan pada daerah kepulauan.
- 5) Kementerian sosial RI untuk melakukan kesinambungan DTKS untuk akurasi veryvali data kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi produktif di propinsi kepulauan riau
- 6) Kementerian sosial RI agar meningkatkan penyediaan lumbung sosial di setiap kecamatan yang rawan bencana berada tersebar di daerah kepulauan

- 7) Kementerian sosial RI agar memberikan apresiasi kepada walikota batam yang telah berkomitmen untuk menurunkan angka penerima bantuan sosial tahun depan dengan komitmen membuka lapangan kerja yang luas
- 8) Kementerian sosial RI agar melibatkan lembaga sosial kemasyarakatan dan memfasilitasi serta koordinasi untuk program kesejahteraan anak-anak yang berada di daerah kepulauan
- 9) BNPB untuk segera koordinasi dengan BPBD Propinsi dan Kota/Kab yang berbasis kepulauan untuk kesiapsiagaan penanganan bencana yang di akibat dampak alam kepulauan dengan menyiapkan armada yang bisa menjangkau daerah berbasis kepulauan yang sering terjadi di propinsi kepulauan riau
- 10) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk melakukan penguatan kelembagaan dan perlindungan perempuan dan anak di kota batam dan propinsi kepulauan riau
- 11) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membuat pilot project pelayanan penanganan dan rujukan korban tindak pidana kekerasan seksual di kota batam propinsi kepulauan riau

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

H. MARWAN DASOPANG, M.SI

BAB. V

DPUBLIKASI MEDIA CETAK - ELEKTRONIK KEGIATAN KUNKER RESES KOMISI VIII DPR RI

Kunjungan reses Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Kepri dan penyaluran bantuan SBSN dan paket ramadhan



Kunker Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pemprov Kepri dan penyaluran bantuan oleh Kemensos RI



Penyaluran BLT minyak goreng, PBNT dan PKH Kota Batam



Publikasi cetak dan elektronik kegiatan kunker reses komisi VIII DPR RI

The screenshot shows a news article on the website kepri.harianhaluan.com. The article is titled "Komisi VIII DPR RI Kunjungan Kerja ke Kepri" and is dated "Senin, 18 April 2022 | 19:50 WIB". The author is "Feri Heryanto". The article features a photograph of H. Marwan Dasopang, Chairman of the VIII DPR RI Commission, receiving a certificate of appreciation from the Kepri Provincial Government. The certificate is for his role as the Chairman of the Reses Team. The article is categorized under "Politik". A "Terpopuler" (Most Popular) sidebar on the right lists six trending articles, including "Banding Diterima, Ahmad Mipon Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum dan Beba...", "Kuasa Hukum Minta Kejaksaa Batam Segera Eksekusi Putusan Banding...", "MBI Batam Berbagi Takjil Buka Puasa Ramadhan kepada Pengendara", "Puasa Membingkai Kearifan Hidup Berbangsa", "Kemenag Buka Seleksi Imam Masjid Uni Emirat Arab, Ini Syaratnya", and "Kaca Rumah Warga Bergetar Akibat Gunung Anak Krakatau Semburkan...". The Windows taskbar at the bottom shows the date as 03/38 and 25/04/2022.

The screenshot shows a news article on the website kepri.kemenag.go.id. The article is titled "Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang Tutup Expo Ramadhan Kemenag Kepri 2022" and is dated "18-04-2022". The article features a photograph of H. Marwan Dasopang speaking at a podium during the closing ceremony of the Ramadhan Expo. The article is categorized under "Berita Terbaru". A sidebar on the right lists several news items, including "PMKL Jalin Sinergisitas Dengan Polres Li...", "Isi Kultum 20 Ramadhan, Kepala KUA Kec. T...", "Sagulung Berdzikir dan Qiyamullail di Ma...", "Podcast UIB Hadirkan Ustadz Ridho Amir S...", "Kemenag Mulai Cairkan Rp 336 M Dana Bant...", "Hajjuardi, S.Kom : Jangan Remehkan Sifat...", and "Ka Kankemenag Natuna Harini Safari Damat...". The Windows taskbar at the bottom shows the date as 03.37 and 25/04/2022.

Laporan Kunker DPR Kom8 19 April 2022 - Word (Product Activation Failed)

kepri.harianhaluan.com/daerah/pr-133227871/wakil-ketua-komisi-viii-dpr-ri-tutup-expo-ramadhan-kemenag-kepri-2022

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tutup Expo Ramadhan Kemenag Kepri 2022

Feri Heryanto - Senin, 18 April 2022 | 19:57 WIB



1 Banding Diterima, Ahmad Mipon Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum dan Beba...

2 Kuasa Hukum Minta Kejaksanaan Batam Segera Eksekusi Putusan Banding...

3 MBI Batam Berbagi Takjil Buka Puasa Ramadhan kepada Pengendara

4 Puasa Membingkai Kearifan Hidup Berbangsa

5 Kemenag Buka Seleksi Imam Masjid Uni Emirat Arab, Ini Syaratnya

6 Kaca Rumah Warga Bergetar Akibat Gunung Anak Krakatau Semburkan...

7 Pemerintah Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Taskbar: NOTULENSI kunk...docx, Daftar Pertanyaa...docx, V2.18042002-Rap...pptx, Bacaan RESES Ke...docx, DATA PRESTASI T...docx


System tray: 26°C, 03:37 25/04/2022

Laporan Kunker DPR Kom8 19 April 2022 - Word (Product Activation Failed)



metropolis.batampos.co.id/warga-batam-terima-bantuan-blt-minyak-goreng/

METROPOLIS INFO KOTA METRO LIFE MIKRO BISNIS HUKUM & KRIMINAL ZETIZEN

Info Kota
Selasa, 5 Apr 2022 - 11:35 WIB



Wali Kota Batam, Muhammad Rudi (kanan) bersama rombongan Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT sembako dan BLT Minyak Goreng di Dataran Engku Putri. Foto: Diskominfo Kota Batam untuk Batam Pos

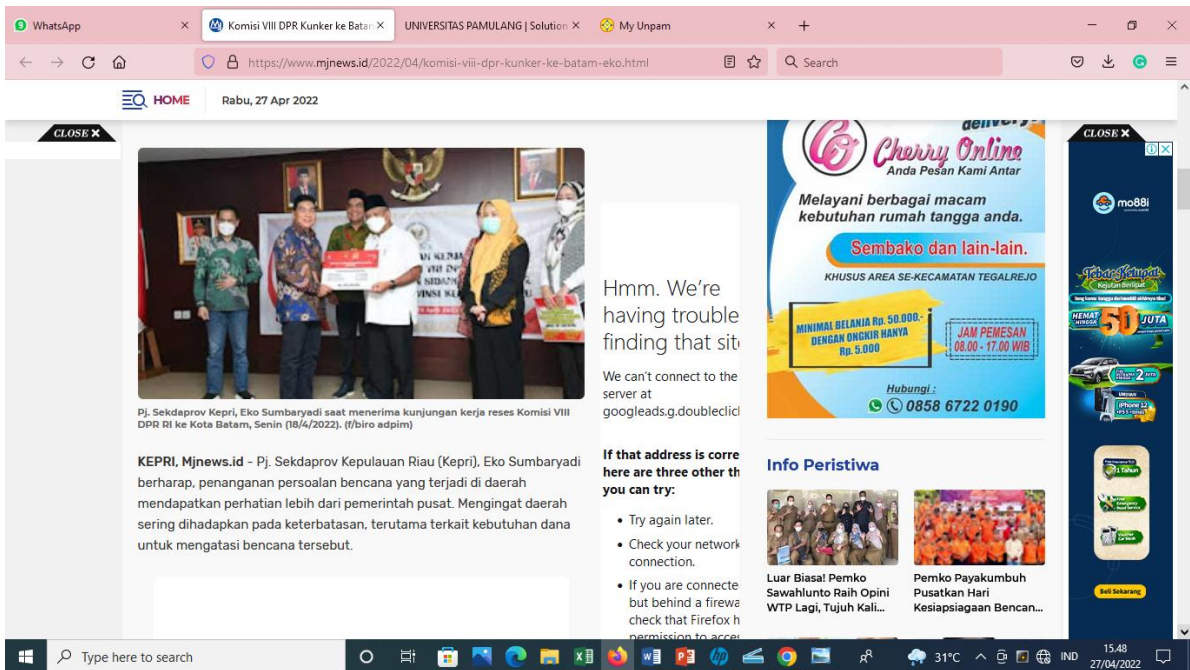
EKONOMI BATAM TERTINGGI
Di Kepri dan Melampaui Nasional

BATAM	4.75%
KEPRI	3.43%
NASIONAL	3.69%

Other data: KAWASAN 2.75%, MINYAK 2.37%, LINGGA 1.59%, BUNTAI 0.99%, BATAM 0.25%, BATANG 0.25%

Taskbar: NOTULENSI kunk...docx, Daftar Pertanyaa...docx, V2.18042002-Rap...pptx, Bacaan RESES Ke...docx, DATA PRESTASI T...docx

System tray: 26°C, 03:39 25/04/2022



Laporan Kunker DPR Kom8 19 April 2022 - Word (Product Activation Failed)

transkepri.com/news/detail/13398/walikota-batam-salurkan-blt-minyak-goreng

HOME NUSANTARA DAERAH EKONOMI & BISNIS INTERNASIONAL OLAHRAGA TEKNO POLITIK MORE

Home / BATAM

PROMOSIKAN PRODUK ANDA DISINI

Jangan khawatir, kami akan membantu!

Walikota Batam Salurkan BLT Minyak Goreng

Selasa, 19 April 2022 - 21:45:33 WIB

EKONOMI BATAM TERTINGGI
Di Kepri dan Metampai Nasional

BATAM	4,75%
KEPRI	3,13%
NASIONAL	2,02%

Terkini INDEX

Rudi Berkeinginan Suatu Saat Batam Contoh Pembangunan Daerah
24 April 2022

Dinas Kominfo Batam Selesaikan Pembuatan Aplikasi SILH
24 April 2022

Amsakar Dorong Pengembangan SDM

NOTULENSI kunk...docx Daftar Pertanyaa...docx V2.18042002-Rap...pptx Bacaan RESES Ke...docx DATA PRESTASI T...docx Show all

Type here to search 26°C 03:40 25/04/2022

Laporan Kunker DPR Kom8 19 April 2022 - Word (Product Activation Failed)

suara.com/news/2022/04/18/202926/blt-minya-goreng-dari-kemensos-diharapkan-mengurangi-pengeluaran-di-tengah-tren-kenaikan-harga-jelang-idul-fi...

suara.com MENUJU ISKAK 00:44:23 Jakarta & sekitarnya


NEWS BISNIS BOLA SPORT LIFESTYLE ENTERTAINMENT OTOMOTIF TEKNO HEALTH FOTO CLICKMOV NETWORKS INDEKS

yOursay.id Cek Fakta Infografis JAKARTA BOGOR BEKASI JABAR JOGJA JATENG MALANG JATIM BALI LAMPUNG Regional lainnya

BLT Minyak Goreng dari Kemensos Diharapkan Mengurangi Pengeluaran di Tengah Tren Kenaikan Harga Jelang Idul Fitri

Fabiola Febrinastris | Iman Firmansyah

Senin, 18 April 2022 | 20:29 WIB



TERPOPULER

- BOGOR | 06:00 WIB
Trending Topic di Twitter, Netizen Bongkar Biaya dan Aturan Manggung Tri Suaka: Ini...
- SUMUT | 06:05 WIB
Tolak Bayar E-Parking, Pria Ini Ancam Patahkan Leher Bobby Nasution
- RIAU | 09:46 WIB
Viral Sosok Kyai Tampar Banser: Kyai Tak Dijaga, Gerejanya yang Dijaga!
- SUMSEL | 06:44 WIB
Sopir Truk Kesal Jalan Tol Lampung-Palembang Berlabang, Menteri Basuki...

NOTULENSI kunk...docx | Daftar Pertanya...docx | V2.18042002-Rap...pptx | Bacaan RESES Ke...docx | DATA PRESTASI T...docx

Type here to search

Laporan Kunker DPR Kom8 19 April 2022 - Word (Product Activation Failed)

infopublik.id/kategori/nusantara/626256/rudi-dorong-kpm-bantuan-sosial-naik-tingkat-jadi-keluarga-sejahtera

ASDP: Masyarakat Mudik Lebih Awal dan Manfaatkan Tiket Mandiri via Ferizy

Rudi Dorong KPM Bantuan Sosial Naik Tingkat Jadi Keluarga Sejahtera

Rabu, 20 April 2022 | 13:16 WIB | Penulis: MC KOTA BATAM | Redaktur: Kusnadi

Batam, InfoPublik – Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama rombongan Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sosial PKH BPNT/Sembako dan BLT Minyak Goreng di Dataran Engkukuputri Batam, Selasa (19/4).

Untuk PKH, yang disalurkan yakni tahap 2 kepada 18.866 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal Rp15.164.075.000,-.

Rudi menyampaikan pemerintah terus berusaha untuk mengayomi masyarakat. Berbagai bantuanpun diberikan. Hanya saja, ia mengajak KPM untuk memiliki tujuan naik tingkat ke depan.

"Rasa syukur patut kita ucapkan, bantuan selalu disalurkan. Tapi saya mengetuk hati kita, sewaktu-waktu kita harus bangkit, ekonomi bapak ibu harus lebih baik," harap Rudi yang turut diamini para KPM yang hadir.

Rudi menyampaikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejak awal pihaknya melakukan berbagai

BERITA TERPOPULER

- Gubernur Sumsel Safari Ramadan di Kediaman Tokoh Masyarakat Sumsel
Minggu, 24 April 2022 | 10:21 WIB | Oleh MC Provinsi Sumatera Selatan
- Maknai Bulan Suci Ramadhan, PMIL, GP, Ansur dan Banser Kapuas Berbagi Takjil
Minggu, 24 April 2022 | 04:43 WIB | Oleh MC KAB KAPUAS
- Bupati Banjar Tutup MTQ Korpri 2022
Minggu, 24 April 2022 | 04:39 WIB | Oleh MC KAB BANJAR
- GOW Kabupaten Kapuas Laksanakan Acara Puncak Peringatan Hari Kartini ke-144 Tahun 2022
Minggu, 24 April 2022 | 15:10 WIB | Oleh MC KAB KAPUAS
- Ingin Mudik, Baiknya Lapor RT Dulu
Minggu, 24 April 2022 | 04:48 WIB | Oleh MC

NOTULENSI kunk...docx | Daftar Pertanya...docx | V2.18042002-Rap...pptx | Bacaan RESES Ke...docx | DATA PRESTASI T...docx

Type here to search

Laporan Kunker DPR Kom8 19 April 2022 - Word (Product Activation Failed)

batam.pikiran-rakyat.com/batam/pr-2304296635/komisi-viii-dpr-ri-salurkan-bantuan-minyak-goreng-di-batam

BERITA UTAMA BATAM KEPRI EKONOMI & BISNIS NASIONAL INTERNASIONAL NUSANTARA OLAHRAGA LIFESTYLE ENTERTAINMENT EDUKASI

Komisi VIII DPR RI Salurkan Bantuan Minyak Goreng di Batam

Fadhil - 19 April 2022, 20:54 WIB



Lebih Higinis & Sehat

Buka

insureka! Asuransi Mobil #BeneranBeda Beli hanya 3 menit Diskon 25% + 15% Cashback

insureka! Asuransi I #Beneran Beli har 3 me Disko 25% + 1 Cashba

NOTULENSI kunk...docx Daftar Pertanya...docx V2.18042002-Rap...pptx Bacaan RESES Ke...docx DATA PRESTASI T...docx Show all

Type here to search 26°C 03:38 25/04/2022